



## CITRA INDONESIA PADA GOLONGAN PRIAYI JAWA MELALUI CORAK PENDIDIKAN BARAT

Gian Fajar Gemilang\*

Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

### ABSTRACT

*The specialty of the priayi group is based on high status in the social strata of indigenous peoples. Priayi group has access to the wider Western world than other indigenous peoples although it still has restrictions with Europe. Some planned to be like the predecessors who worked in the colonial government and others chose to elevate the status of their people just like the Europeans. Through Western education, they are hoping can advance indigenous peoples and create a new social identity. With the technique of literature studies and using historical methods, this study aims to find out the contribution of the priayi group to the existence of the Indonesian state through Western education during Dutch colonialism. Studies show the education they get becomes the solution to the social problems of the Dutch East Indies community. Social equality has inspired them to enculturate as a step of harmonization of indigenous peoples and form a nationalist spirit as the one Indonesian people. The struggles of the priayi group become a picture of supporting the success of Indonesian society that gives the fruit of the thought to live a community life today.*

### ARTICLE HISTORY

Submitted 20 January 2022  
Revised 08 February 2022  
Accepted 17 February 2022  
Published 28 February 2022

### KEYWORDS

colonial society; Javanese priayi; Western education.

### CITATION (APA 6<sup>th</sup> Edition)

Gemilang, G.F. (2022). Citra Indonesia pada Golongan Priayi Jawa melalui Corak Pendidikan Barat. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*. 6(1), 30-40.

### \*CORRESPONDANCE AUTHOR

[gianfajargemilang1@gmail.com](mailto:gianfajargemilang1@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i1.4886>

## PENDAHULUAN

Masa kekuasaan Belanda di Indonesia setelah runtuhnya kongsi dagang VOC menempatkan sebagian besar masyarakat masuk dalam sebuah kehidupan politik yang tidak pasti. Pamor kekuasaan kerajaan Islam yang perlahan merosot sebagai bentuk pengalihan kekuasaan menyebabkan kerajaan kehilangan pamornya. Urbanisasi menjadi langkah pemerintah kolonial menyebarkan penduduk yang semula memusat pada kerajaan, pusat, tempat pemujaan dan persimpangan sebagai bentuk perkembangan usaha milik mereka di berbagai daerah di Nusantara (Poesponegoro, 2008). Dengan fokus pada Jawa sebagai pusat politik dan perekonomian Hindia Belanda memberikan gambaran kompleks pemerintah kolonial untuk dapat menyelami kebudayaan Nusantara. Penyerapan ini bagaimanapun juga tidak dibarengi dengan akulturasi kebudayaan mereka dengan kebudayaan lokal setempat.

Proses pembaratan dimulai ketika mereka mulai mendalami aspek sosial masyarakat Nusantara yang mencakup kebudayaan dalam lingkup agama dan bahasa masyarakat lokal. Reaksi pertemuan dua bentuk kebudayaan ini nyatanya terjadi dengan sangat lambat. Dengan memahami kebudayaan lokal tanpa adanya timbal balik menyebabkan akulturasi menjadi lebih sulit. Tindakan ini tidak semata fenomena umum, namun langkah kolonial menghambat perkembangan di wilayah yang mereka jajah. Walau demikian penyebaran budaya Eropa tidak merupakan hubungan yang negatif, setidaknya bagi sebagian golongan masyarakat, salah satunya kaum priayi. Dengan alasan pamor kerajaan yang meredup atau bahkan hilang, golongan bangsawan kerajaan ini mulai mencari arah dan menetapkan Ratu Belanda sebagai 'raja' mirip pada masa kerajaan terdahulu (Adam, 2020). Fenomena ini dapat dimengerti ketika pengaruh kerajaan terdahulu yang kental akan tradisi dan hal berbau spiritual tidak hilang sepenuhnya dalam sistem sosial masyarakat setempat. Bentuk modernisme kebudayaan yang dibawa bangsa Barat kemudian lebih berpengaruh pada sebuah bagian dari masa lalu masyarakat lokal (Purwanto, 2019). Diangkatnya priayi yang disebut Lombard (2005)

sebagai golongan *elite* memberikan sedikit pengaruh pada sudut pandang kebaratan mereka, setidaknya sampai batas tertentu.

Istilah priayi telah dipahami dengan baik oleh masyarakat lokal maupun pemerintah kolonial. Merujuk pada kelas atas pemerintahan di Jawa, mereka dianggap sebagai kelompok orang yang memiliki integritas dan terhormat. Memiliki kesadaran tuntutan moral yang ada pada golongan mereka, citra priayi dianggap sebagai seorang yang mampu memenuhi tuntutan baik spiritual, seremonial juga teknis jabatan (Sutherland, 1975). Golongan priayi banyak merujuk pada orang yang memiliki jabatan jaksa, petugas cukai hingga guru. Eksklusivitas priayi oleh kolonial semata tidak hanya merupakan gelar atau jabatan saja, melainkan memiliki tugas memperkuat administrasi negara jajahan (Lombard, 2005). Hal ini didukung dengan arahan pembentukan sekolah guna merangkul priayi yang loyal pada raja, yaitu:

- 1) Membaca dan menulis dalam bahasa Jawa dan Sunda ataupun bahasa Melayu jika diperlukan,
- 2) Pengetahuan keilmuan perihal penimbangan,
- 3) Ilmu alam tanah Jawa dan wilayah tetangganya,
- 4) Ukur tanah dan pengukuran “*leveling*” (Adam, 2020).

Kesadaran akan pembelajaran yang merupakan syarat kemajuan pendidikan masyarakat pribumi tampaknya masih kurang didapatkan secara menyeluruh oleh golongan priayi. Terbatasnya sekolah di lingkungan mereka sebagai batasan bagi kaum pribumi terhadap pengetahuan Barat menjadi permasalahan utama fenomena ini, setidaknya sangat umum terjadi sebelum abad-19. Permasalahan ini tidak semata menjadi patokan rendahnya keingintahuan masyarakat pribumi untuk memiliki pengetahuan sebaliknya menjadi dorongan kompetisi dengan individu lain untuk menjadi seperti pendahulu mereka. Para priayi yang telah mendapatkan pendidikan Barat sebagian berpikir akan menjadi bupati seperti ayah mereka, namun tidak jarang dari mereka yang memilih profesi yang lebih bebas dengan tujuan menyamaratakan kedudukan mereka dengan orang Eropa. Kemunculan pemikiran ini dibarengi dengan bentuk pelatihan administrasi dan sistem sekolah Hindia Belanda yang mulai abad ke-20 terpapar pembaratan yang lebih konsisten dibandingkan generasi sebelumnya (Sutherland, 1975).

Faktor politik tampak sangat mempengaruhi pendidikan yang ada di Hindia Belanda. Politik dalam pendidikan tidak lepas pula kaitannya dengan pertimbangan perekonomian yang memang menjadi tujuan utama kedatangan mereka (Riska & Hudaidah, 2021). Walau merupakan golongan orang terpendang, para priayi tetap masuk pada golongan pribumi. Dalam artian bahwa diskriminasi pendidikan yang masih sangat tinggi, menempatkan golongan priayi pada tingkatan rendah dari keseluruhan stratifikasi sosial Hindia Belanda. Namun demikian kesadaran belajar masyarakat pribumi yang belum memuaskan bagi kaum priayi membangkitkan perbincangan dalam golongan mereka. Hasil dari keresahan ini adalah berbagai macam publikasi mulai dari surat kabar, majalah, guna menyalurkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan sebelumnya pada anak pribumi maupun bangsawan itu sendiri (Adam, 2020).

Perkembangan lambat masyarakat pribumi menjadi cambuk bagi golongan priayi untuk dapat peduli terhadap rakyatnya. Hasil studi Lombard (2005) menyatakan bahwa dampak dari pembaratan yang besar bagi golongan priayi menjadi sebuah jalan terbentuknya kelompok cendekiawan yang memiliki haluan politik berbeda dan menentang terhadap sang raja juga sebagai kelompok penggerak nasionalisme Indonesia. Penelitian ini menempatkan diri pada kajian bentuk kontribusi priayi Jawa terhadap lahirnya nasionalisme Indonesia melalui resep politik dan pendidikan Barat yang mereka temukan. Penelitian ini akan menginformasikan bagaimana peran para priayi Jawa dalam memajukan khazanah pengetahuan masyarakat pribumi tidak lain sebagai bentuk dari kemunculan rasa cinta

tanah air. Informasi ini akan melengkapi penelitian terdahulu utamanya memperluas kajian kebangkitan nasional Indonesia.

Studi pada peran priayi dalam pembentukan Indonesia tidak hanya menyelidiki hasil yang didapatkan untuk sumbangan nasionalisme, tetapi juga relasi antara pengaruh priayi berpendidikan Barat pada tanah air Indonesia. Hal ini membuat penelitian menggunakan sumber yang beragam sebagai lanjutan penelitian lainnya. Pertama, studi mengenai karakteristik sosial dan edukasi dari priayi masa Hindia Belanda. Kedua, kebijakan pemerintah Belanda terhadap edukasi bagi masyarakat pribumi. Ketiga, priayi dalam kaitan erat kebaratan dengan proses nasionalisme yang muncul sebagai benih dari kemerdekaan Indonesia.

## METODE

Metode sebagai langkah sistematis guna menyelidiki suatu disiplin ilmu untuk mendapatkan bahan dari objek yang diteliti dan erat kaitannya dengan metodologi sebagai cara mengetahui bagaimana mengetahui sejarah (Sjamsuddin, [2007](#)). Perihal kepentingan analisis penelitian ini menggunakan jenis penelitian sejarah yang mencakup tiga langkah utama di antaranya heuristik yaitu pengumpulan sumber, kritik yaitu pengujian sumber, dan historiografi yaitu penulisan sejarah (Ismaun et al., [2016](#)). Peneliti menggunakan sumber dokumenter berupa rekaman sejarah dalam bentuk tulisan yang didapatkan melalui studi pustaka dengan menggunakan artikel jurnal terdahulu juga buku teks referensi yang kredibel dan merujuk pada informasi mengenai perjuangan priayi Jawa mewujudkan Indonesia melalui pendidikan Barat. Sumber yang didapatkan kemudian melalui tahap pengujian sumber untuk menemukan dan mendekati kebenaran melalui kritik eksternal dan internal. Penulisan sejarah dilakukan dengan kecenderungan penafsiran sosio-historis yang merujuk pada interaksi golongan priayi dengan masyarakat dan lingkungannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Priayi Jawa

Priayi merupakan sebuah sebutan yang mana merujuk pada “adik” raja dengan status sosial yang tidak bisa ditentukan dengan pasti, karena didasarkan atas jauh dekatnya hubungan mereka dengan sang raja (Lombard, [2005](#)). Lebih jelas Arimi ([2008](#)) menjelaskan penempatan golongan ini dalam struktur sosial masyarakat kerajaan Jawa bersamaan dengan tiga golongan lain, raja, priayi, dan *kawula*, menyandang status kelas atas sehingga dipandang sangat mulia dan terhormat dalam struktur sosial masyarakat pribumi.

Refleksi kemajemukan Jawa menempatkan golongan priayi pada wilayah administrasi yang terbatas. Sutherland ([1975](#)) mengungkapkan ketika masa pemerintahan kolonial Belanda, identitas formal diberikan pada priayi sebagai petinggi wilayah administrasi yang dikenal dengan nama kabupaten. Dengan jumlah tanah yang lebih luas sebagai supra-desa memberikan kemudahan bagi bangsa Belanda memperluas pengaruh mereka, terlebih ketika mereka mempercayai kedatangan bangsa Barat untuk dapat memperkuat posisi wilayah mereka, di samping memercayai ratu Belanda sebagai *susuhunan* mereka (Lombard, [2005](#); Onghokham, [2004](#)).

Kehidupan golongan priayi mulai dilirik dengan tingginya identitas kelompok mereka dalam struktur sosial masyarakat Hindia Belanda. *Ningrat* menjadi simbol utama dengan merujuk pada gaya hidup yang kebarat-baratan (Arimi, [2008](#)). Selain memiliki istilah golongan “darah biru”, mereka pula dianggap mumpuni untuk dapat berhubungan tanpa bantuan dan waspada dalam membangun pergaulan dibanding kelompok masyarakat lainnya (Wahyuningtyas, [2017](#)). Maka dari itu banyak dari masyarakat Jawa kerap memberikan tempat yang spesial bagi para priayi. Sebagai golongan yang tidak tercela dan menjadi panutan, masyarakat pribumi banyak berharap menjadi bagian dari golongan mereka (Anderson, [1972](#)).

Struktur sosial masyarakat Jawa di bawah sistem kerajaan terdahulu tampak tidak dapat dihilangkan, bahkan ketika kedatangan Belanda ke Indonesia. Memahami budaya Jawa seakan menjadi kunci kesuksesan kolonial dalam penyebaran pengaruhnya pada struktur sosial yang mendalam. *Cultuurstelsel* salah satunya diberlakukan dengan memberikan hak lebih pada priayi elite, yang tidak diketahui oleh mereka merupakan cara lembut memanfaatkan dan menguatkan kekuasaan kolonial di Jawa

“Semakin kita hormati hak-hak kekeluargaan pemimpin itu, mereka akan semakin bergantung pada kita, karena yang sangat mereka dambakan adalah mempertahankan hak yang sebelumnya tidak pernah dijamin raja mereka terdahulu ...” tutur Van den Bosch (dalam Lombard, [2005](#)).

Ia mengetahui bahwa para priayi yang merupakan petinggi dengan sebutan bupati telah menyerahkan nasib rakyat kecil pada kehendaknya. Sebagai bentuk stabilitas kekuasaan tanpa memakan banyak biaya untuk mendapatkannya, J.S. Furnivall menyebut fenomena ini sebagai bentuk pemerintahan kolonial tidak langsung, menanamkan kekuasaan politik pada kaum pribumi itu sendiri (Onghokham, [2004](#)). Sikap ini setidaknya hanya bertahan hingga sebelum abad ke-19, dan setelahnya priayi yang memiliki wawasan ‘kebaratan’ yang lebih luas mendua pada konsep nasionalisme bersamaan dengan kalangan intelektual lainnya (Arimi, [2008](#)).

### **Kebijakan Pendidikan Hindia Belanda**

Tujuan utama kolonial Belanda guna eksploitasi daerah jajahan terhambat dengan sumber daya manusia yang belum terdidik. Oleh karena itu, di samping kepentingan ekonomi mereka terdapat usaha mengembangkan pendidikan guna membantu administrasi kelompok mereka di Nusantara (Heru et al., [2014](#); Riska & Hudaidah, [2021](#); Wahyuni, [2015](#)). Boone (dalam Supardan, [2008](#)) menyatakan secara keseluruhan pendidikan masa Belanda terbagi pada tiga periode. Pertama, periode kekuasaan kongsi dagang VOC dengan rentang waktu abad ke-17 dan ke-18. Kedua, periode pemerintahan kolonial Belanda. Ketiga, periode Politik Etis masa prakebangkitan nasional Indonesia. Melalui kebijakan pendidikan Barat yang diberlakukan, walau tidak merata namun diharapkan kemudian dapat memperluas pendidikan masyarakat pribumi sehingga muncul tenaga kerja terdidik yang dapat dibayar dengan upah murah (Riska & Hudaidah, [2021](#)).

Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka telah menggunakan cara pendidikan yang dipadukan dengan politik. Menurut Salindri ([2010](#)) setidaknya terdapat enam cara pendidikan diterapkan. Pertama, gradualisme pendidikan sebagai langkah Belanda yang tidak ingin mencampuri urusan lokal dan membiarkan penduduk Hindia Belanda dalam keadaan pendidikan yang sama, seperti sebelum kedatangan mereka. Kedua, dualisme pendidikan yang bertujuan membagi kelas pendidikan baik dalam segi rasial maupun sosial. Ketiga, kontrol sentral yang kuat dengan kebijakan harus melalui persetujuan Gubernur Jenderal atau Direktur Pendidikan Kolonial. Keempat, pendidikan sebagai langkah penyediaan pegawai untuk golongan aristokrat, termasuk adalah para priayi. Kelima, konkordansi dengan penyamaan antara kurikulum Hindia Belanda dengan sekolah di Belanda. Keenam, tidak adanya organisasi yang bersifat sistematis. Namun demikian, hanya segelintir masyarakat yang menyekolahkan anak mereka dengan sistem pendidikan Eropa. Itu pula menurut J.S. Furnivall (dalam Marisa & Hudaidah, [2021](#)) bila seseorang pergi bersekolah Belanda pada pagi hari, biasanya mereka akan dikirim ke sekolah (Islam) pada sore hari sebagai pengimbang. Sekolah pagi mengajarkan mereka untuk mencari nafkah, sedangkan sekolah sore mengajarkan untuk hidup.

Priayi Jawa sebagai kelompok bangsawan mendapatkan perlakuan spesial di mata pemerintah kolonial. Edukasi yang didapatkan oleh mereka digunakan oleh kolonial Belanda untuk dapat menjadi seorang dengan status kepegawaian sipil dan dalam pemerintahan itu sendiri (Yuniarti, [2018](#)). Fenomena ini dilatar belakangi dari struktur pendidikan Hindia Belanda yang didasarkan atas strata dan golongan sosial masyarakat. Sekolah Kelas Satu atau *Eerste Klasse School* ditujukan untuk masyarakat golongan Eropa dan priayi, dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar sekolah bagi

anak Eropa dan Melayu untuk anak Pribumi. Sekolah Kelas Dua bagi penduduk pribumi dan golongan menengah ke bawah (Marisa & Hudaidah, [2021](#)). Khusus bagi Sekolah Kelas Dua, para bupati yang bertugas dalam wilayah administrasinya diminta mengorganisir sekolah dengan bentuk kurikulum yang disesuaikan dengan lingkungan Jawa. Diharapkan dengan adanya sekolah ini dapat menjadikan anak-anak yang masuk sekolah sebagai anak Jawa yang baik (Supardan, [2008](#)).

Walau masuk pada Sekolah Kelas Satu tetap masyarakat priayi masih mendapatkan diskriminasi. Bila dapat dibandingkan kaum priayi lelaki akan lebih mudah untuk mendapatkan posisi tinggi dan penting dalam pemerintahan. Kaum lelaki akan lebih bebas memilih dibandingkan dengan kaum perempuan. Fenomena ini disebabkan tidak lain bahwa lelaki dapat lebih mudah untuk bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan perempuan sedari umur 12 tahun mulai dipingit dan hanya melakukan sedikit pekerjaan. Hampir keseluruhan dari golongan priayi, kaum lelaki lebih mendapat kesempatan untuk mendapat akses pendidikan yang telah disediakan (Yuniarti, [2018](#)). Gambaran tersebut merupakan gambaran priayi dan golongan mereka, berbeda dengan masyarakat lokal pribumi yang merupakan masyarakat biasa dan tidak bekerja langsung dengan pemerintah. Karena perhatian lebih banyak untuk peranakan Eropa dan kaum priayi, sangat sedikit masyarakat pribumi yang dapat bersekolah. Fenomena ini menandakan kurangnya usaha pemerintah untuk menyediakan sekolah bagi pribumi (Supardan, [2008](#)).

Setidaknya dalam dekade kekuasaan mereka, pembatasan pendidikan antara golongan Eropa dengan pribumi perlahan mulai berkurang. Hal ini diperkuat dengan adanya putusan *Koninklijk Besluit* pada 1864 yang salah satunya membahas pada pendidikan Barat yang bisa didapatkan masyarakat secara terbuka (Nasution, [2011](#)). Ditambah dengan adanya kebijakan Politik Etis sebagai dasar dari pelaksanaan bentuk pendidikan yang mengacu pada pengetahuan Barat dengan kurikulum yang diatur oleh pemerintah Belanda (Alinur, [2017](#)).

Politik Etis yang diberlakukan banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat pribumi. Fenomena ini dilatarbelakangi oleh kebanggaan bangsa Belanda terhadap hasil dari pendidikan yang sering kali membuat pemerintah senang. Maka dari itu usul Politik Etis yang diberlakukan kemudian disetujui untuk dapat ditingkatkan pada seluruh masyarakat Hindia Belanda (Susilo & Isbandiyah, [2018](#)). Selain itu dengan adanya Politik Etis mulanya gelar priayi diperoleh melalui jalur keturunan namun kemudian bisa didapatkan oleh masyarakat pribumi dengan pendidikan yang tinggi (Prayudi & Salindri dalam Riska & Hudaidah, [2021](#)). Hal ini juga termasuk pada dampak dari pendidikan seperti pekerjaan dan hidup yang berkecukupan. Ditandai dengan perubahan struktur sosial yang mulanya horizontal, perlahan memiliki stratifikasi akibat dari kedudukan seseorang dan umumnya disebabkan mobilitas masyarakat yang tinggi menuju perkotaan yang asal mulanya dari pendidikan Barat yang mereka dapatkan (Poesponegoro & Nugroho, [2008](#)).

Subekti ([2021](#)) menyatakan bahwa Politik Etis sebagai langkah pemerintah Belanda mengembangkan negeri dan bangsa jajahan di bawah kekuasaan mereka, dengan guna mengembangkan negeri tersebut pada patokan negara Barat (Belanda). Definisi ini mengandung unsur paradoksal, ketika ungkapan “untuk kepentingan Indonesia, namun di bawah pimpinan Belanda.”

*all these people want to help so much: “let me help you”, or you can hear them say, “let me show you to do it, let me do it for you”* [Semua orang ini ingin membantu begitu banyak: "biarkan saya membantu Anda", atau Anda dapat mendengar mereka berkata, "biarkan saya menunjukkan kepada Anda untuk melakukannya, biarkan saya melakukannya untuk Anda] (Locher-Scholten dalam Subekti, [2021](#)).

Dalam Politik Etis, pendidikan lebih berorientasi pada semangat kolonialisme sebagai bentuk penyangga pemerintahan (Karsiwan & Sari, [2021](#)). Dengan kata lain menggunakan pengetahuan Barat, pendidikan modern dianggap harus setara, namun masih dengan tinjauan Belanda. Walau golongan priayi memiliki kesempatan yang lebih tinggi dalam mendapat pendidikan, untuk mencapai karier

cemerlang sama seperti kelas sosial lainnya perlu dilakukan dengan usaha yang keras. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hak sebagai golongan terpandang dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat juga kolonial (*gelijkgesteld*) (Poesponegoro & Nugroho, 2008).

Kajian pada sistem pendidikan kolonial Belanda dapat ditinjau dari bentuk kebijakan para Gubernur Jenderal yang berkuasa kala itu. Semisal, kebijakan Willem Roseboom (1899-1904) meresmikan kebijakan perluasan penggunaan bahasa Belanda bagi para pribumi, Johannes Benedictus van Heutsz (1904-1909) mengembangkan bentuk sekolah yang lebih sederhana dan murah, begitu pun pada masa kelanjutan pemerintahan mereka. Secara tersirat tetap memiliki tujuan utama memenuhi keperluan Belanda dengan tenaga kasar pribumi (Heru et al., 2014).

Secara keseluruhan masa Politik Etis, pendidikan terdiri dari tiga tingkatan yaitu; Pendidikan Rendah (*Lager Onderwijs*), Pendidikan Menengah (*Middlebaar Onderwijs*), dan Perguruan Tinggi (*Vokonderwijs*) (Riska & Hudaidah, 2021). Dengan kesempatan pendidikan ini masyarakat pribumi dapat menyamaratakan kedudukan sosial dengan kelas bangsawan di samping golongan priayi itu sendiri mengejar karier yang sama. Tidak jarang di antara mereka yang berambisi untuk dapat mendapatkan kedudukan terlibat dalam konflik antar elite yang didasarkan atas persaingan dengan merujuk pada status sosial berupa kedudukan, posisi administratif, dan pendidikan Barat yang mereka dapatkan (Poesponegoro & Nugroho, 2008)

## Indonesia dalam Pandangan Priayi Hindia Belanda

Priayi Jawa dengan keistimewaannya dan jangkauan pendidikannya yang luas secara tidak langsung dipisahkan dari rakyat pribumi. Kecakapan mereka berbahasa Belanda dan meniru gaya hidup masyarakat Eropa memperlihatkan sebuah ketimpangan dalam struktur sosial masyarakat (Yuniarti, 2018). Adapun di lain hal, pendidikan barat yang diperkenalkan Belanda pada para priayi memberikan pengetahuan lebih terutama dalam hal membaca, menulis, berhitung, ilmu kebumihan, ilmu alam, sejarah, juga dalam hal menggambar (Poesponegoro & Nugroho, 2008). Ketimpangan di bawah bentuk pendidikan modern ini menginspirasi kaum priayi mengembangkan pendidikan modern terkhusus bagi masyarakat pribumi yang tidak berkesempatan mendapatkannya.

Bentuk dukungan pihak Belanda dalam kemajuan negara koloni mereka melalui Politik Etis memberikan kesempatan lebih bagi masyarakat pribumi untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah kolonial menetapkan kebijakan pendidikan mereka atas dua alasan. Pertama, sebagai bentuk upaya balas budi, pendidikan dan pengetahuan sebaiknya digalakkan sebanyak mungkin bagi golongan pribumi. Kedua, pemberian pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka (Balai Pustaka dalam Sanjaya, 2001). Melalui penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa kebutuhan sumber daya manusia dengan adanya Politik Etis merujuk pada kebutuhan administrasi dengan peningkatan pada mutu manusia itu sendiri dengan catatan penambahan pekerja kasar lebih banyak dalam kebutuhan industri kolonial.

Melalui pendidikan yang masyarakat pribumi dapatkan, gerakan nasionalisme perlahan dibangun melalui kesempatan yang cukup sulit. Perubahan dan kemajuan menjadi wacana utama kaum yang berpendidikan masa itu. Perlahan individu menjadi kelompok, tidak hanya kaum lelaki namun juga kaum perempuan mulai bergerak menggalakkan perubahan bagi negerinya

“Dan apabila gagasan tentang kemajuan itu menjadi hal yang utama, semangat masyarakat tentulah akan berubah, ekonomi tradisional dan etika sosial menjadi retak dan ukuran-ukuran baru mesti diciptakan. Kemudian terciptalah dorongan-dorongan untuk berusaha, terbangunlah rasa tanggung jawab dan keinginan untuk mengabdikan diri kepada sesuatu” – B. Schrieke (dalam Poesponegoro & Nugroho, 2008).

Dekade awal abad ke-20, orang berpendidikan mulai ramai di Jawa meski masih terbatas pada kaum priayi dan bangsawan. Baca dan tulis perlahan mulai dipahami oleh sebagian masyarakat lokal. Secara tidak langsung dengan adanya fenomena ini menyadarkan kaum priayi sebagai cendekiawan

muda untuk melawan kolonialisme dengan menyebarkan pendidikan pada masyarakat luas. Memang dikarenakan terjadinya perubahan yang berdampak langsung pada kegiatan masyarakat, melahirkan tokoh-tokoh nasionalis liberal penentang sang ratu Belanda. Bentuk pendidikan Barat yang dianggap sekuler pula memberikan pandangan masyarakat elite yang kemudian mereformasi bentuk pendidikan yang sesuai bagi seluruh golongan pribumi dari berbagai kelas sosial (Sanjaya, [2001](#)).

Pendidikan ditujukan sebagai sebuah persiapan bagi anak-anak guna berkembang menjadi seorang individu yang merdeka, bermanfaat dalam bermasyarakat, memiliki hubungan erat dengan budayanya sendiri. Dampak yang terasa dari kolonialisme dilihat dari tujuan pendidikan tersebut yaitu adanya tekanan eksternal di luar kekuasaan mereka yang menunjuk pada tekanan individu yang rendah diri dan rasa takut akan kolonialisme itu sendiri. Nasionalisme Indonesia muncul sesuai dengan tuntutan tersebut, melalui tujuan kehidupan bersama yang terikat dalam satu bangsa. Setidaknya menginginkan diri mereka bebas dari segala jenis imperialisme dan kolonialisme juga bentuk politik yang merujuk etnosentrisme antar suku bangsa Hindia Belanda.

Eropanisme tampak menjadi salah satu latar belakang pergerakan nasional masyarakat pribumi. Ketika ekonomi, budaya, dan simbol masyarakat tradisional melebur dengan tradisi masyarakat Barat memberikan sebuah pengalaman baru sebagai resapan dari dua budaya yang berbeda (Widodo, [2017](#)). Priayi Jawa dengan paparan kebaratan yang tinggi juga berkesempatan mendapatkan pendidikan lebih jauh bahkan hingga ke negeri luar menyadari akan fenomena ini dan mengharapkan dapat memberi kontribusi nyata terhadap situasi yang ada di Hindia Belanda. Organisasi dan media massa menjadi taring pergerakan tokoh nasionalis muda untuk menyerukan gagasan anti-kolonialis pada negara asalnya dan lebih luas, pada dunia luar. Terikat dalam kepentingan bersama sebagai masyarakat Hindia Belanda, priayi yang tengah menempuh studinya perlahan tapi nyata menyusun sebuah konsep identitas yang lebih modern, yaitu Hindia Belanda sebagai sebuah bentuk satu negara (Utama, [2018](#)).

Tokoh pergerakan nasional muncul secara perlahan mulai dalam bentuk individual yang mendorong komunitas mereka dahulu untuk dapat maju. Organisasi yang dibentuk kaum cendekiawan tampak selalu menunjukkan semangat persatuan dan menjunjung tinggi kesadaran sebagai saudara sebangsa. Mereka tidak menginginkan bentuk *divide et impera* tumbuh lebih subur lagi dalam lingkungannya (Rusdiana, [2017](#)). Melalui pendidikan yang telah mereka dapatkan, kebanyakan di antaranya memiliki visi sebagai seorang pemimpin bangsa dengan tujuan menghapuskan penjajahan yang ada di tanah Hindia Belanda. Dengan jiwa pluralisme atas etnisitas yang ada di Hindia Belanda, pendidikan Barat menjadi bibit nasionalisme kaum terdidik sebagai sumber daya manusia yang unggul, mencintai bangsa dengan mempertahankan identitas nasional mereka (Astania & Nurani, [2019](#)).

Kesamaan budaya antar golongan mereka menjadi dasar terbentuknya *nation building* yang kemudian mengubah rasa nasionalis individualis menjadi nasionalis yang lebih luas, yaitu bangsa (Kusumawardani & Faturochman, [2004](#)). Karakteristik masyarakat yang multikultural dikategorikan dalam bentuk keruangan yaitu Jawa dan luar Jawa, dengan karakteristik yang sangat berbeda. Keterhubungan antar daerah ini melengkapi keduanya sebagai bentuk *nation* dengan golongan masyarakat terdidik yang lahir dan memiliki spesialisasi berbeda antar wilayah. Cendekiawan Jawa sebagian besar bertransformasi menjadi kaum birokrat, berbeda dengan wilayah luar Jawa dengan komposisi para usahawan (Saddam et al., [2020](#)). Melalui bentuk budaya transformasi Barat dan Timur (tradisional) pada sistem sosial masyarakat, erat kaitannya dengan harmonisasi individu berbagai latar belakang budaya yang tidak jarang berseteru (Prasisko, [2019](#)). Multikulturalisme yang termasuk bagian dari sosio-historis masyarakat ini tampak tetap di jaga masyarakat sebagai warisan yang lestari bahkan hingga pasca kemerdekaan.

Pendidikan Barat memberikan pandangan tokoh priayi pergerakan untuk dapat mewujudkan keinginan bangsa mendidik generasi mereka dengan rasa cinta tanah air melalui langkah sederhana dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pengetahuan yang mereka dapatkan kemudian digunakan dalam bentuk dari strategi berpikir transformatif sebagai respons dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat kolonial. Rasa sebangsa setanah air mereka ungkapkan sebagai bentuk dari satu budaya yang sama, dan melalui pendidikan itulah peningkatan kebudayaan akan terwujud (Purwanto, [2019](#)). Percampuran budaya yang mereka dapatkan dalam pendidikan kemudian dipilah dan diambil yang menurutnya baik bagi diri dan bangsanya

“...Nusantara, pertama kali dipakai oleh Ki Hajar Dewantara, pendiri gerakan Taman Siswa di Jawa. Meskipun hal itu tidak mendapat pengakuan luas – dan barangkali tidak akan terjadi – (istilah ini) telah dipilih untuk judul buku sejarah Hindia Belanda ini sebagai sumbangsih kepada laki-laki dan perempuan Indonesia, yang seperti Dewantara mengerti, bahwa pertukaran cita-cita dengan budaya nasional harus berdasar penghargaan terhadap pertukaran cita-cita dengan budaya-budaya lain, dan yang bertujuan untuk membuat Indonesia sebagai tempat di mana akhirnya Barat dan Timur dapat bertemu...”. B.H.M. Vlekke (dalam Poesponegoro & Nugroho, [2008](#))

Melalui pendidikan tinggi, para elite muda Indonesia yang tengah melanjutkan studi mereka terpikirkan bahwa konsepsi segala aliran yang ada di wilayah Hindia Belanda yang berasal dari pendahulu mereka ternyata memiliki kesamaan yang satu. Tradisional Timur dengan ekonomi Barat yang mereka dapatkan memberikan pemahaman harmonisasi kehidupan yang sama bagi seluruh bangsa baik fisik maupun batin. Identitas masyarakat pribumi yang dianggap sebagai *inlander* dengan segala keterbatasan akibat stratifikasi sosial kolonial telah menyakitkan hati mereka. Demikian menyadarkan mereka untuk dapat membentuk sebuah identitas sosial yang baru (Kusumawardani & Faturachman, [2004](#)). Mewadahi identitas budaya campuran, nasionalisme Indonesia hadir dengan definisi gerakan ideologis dari populasi masyarakat untuk membentuk sebuah bangsa (Aji et al., [2020](#)). Kelak hal ini menjadi dasar dari terbentuknya negara Indonesia.

Pendidikan Barat yang didapatkan oleh priayi dan masyarakat pribumi lainnya membawa peran transformatif khususnya dalam hal upaya enkulturasi budaya juga menumbuhkan rasa sadar masyarakat atas ketimpangan dan penindasan sosial dari kolonial Belanda (Supardan, [2008](#)). Konsepsi Indonesia lahir sebagai sebuah hasil aliran kesamaan baik politik dan budaya masyarakat Hindia Belanda. Indonesia yang mulanya hanya digunakan dalam istilah identitas kaum terdidik bangsa Indonesia di Belanda mulai digunakan sebagai pengertian politik atas sebuah bangsa. Priayi Jawa sebagai golongan yang terpendang dan menjadi representasi identitas kaum terdidik masyarakat Jawa membawa bentuk perubahan yang signifikan pada sistem sosial untuk mencapai Indonesia yang merdeka. Melalui golongan priayi kekuasaan dilawan dengan bentuk kekuasaan kembali guna keluar dari kesengsaraan kemudian merebut politik kolonial Belanda dan menyatakan kemerdekaannya (Suyatno, [2021](#)). Dimulai Oktober 1928, identitas Indonesia perlahan muncul melalui golongan pemuda yang memutuskan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan sebagai bentuk kesadaran identitas nasional yang telah dipupuk secara perlahan pada periode-periode sebelumnya.

Istilah Indonesia sebagai bentuk identitas nasion (bangsa) telah lama dicita-citakan kaum cendekiawan untuk menanamkan bangsa mereka pada ruang lingkup yang lebih luas

*“I prefer the purely geographical term Indonesia, which is merely a shorter synonym for the Indian Islands or the Indian Archipelago. We thus get Indonesian for Indian Archipelagian or Archipelagic and Indonesians for Indian Archipelagians or Indian Islanders.”* [Saya lebih suka istilah geografis murni Indonesia, yang hanya sinonim yang lebih pendek untuk Kepulauan India atau Kepulauan India. Dengan demikian kami mendapatkan bahasa Indonesia untuk Kepulauan India atau Archipelagic dan Orang Indonesia untuk Keuskupan Agung India atau Penduduk Pulau India] (J.R. Logan dalam Poesponegoro & Nugroho, [2008](#)).

Pendidikan Barat telah banyak memberikan ruang bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan rasa nasionalisme dan patriotismenya (Supardan, [2008](#)).

Golongan Cendekiawan Indonesia di Belanda (Perhimpunan Indonesia) menyerukan arti Indonesia dalam sebuah artikel tanpa pengarang “Indonesia sama artinya dengan *Nederlandsch-Indie*, sebagai pengertian ketatanegaraan bagi negara Indonesia yang akan datang. Indonesia tidak hanya berarti telah tercapainya tujuan, tetapi kesatuan, kekuasaan untuk mewujudkan diri sendiri!” (Poesponegoro & Nugroho, [2008](#)). Dengan demikian kebangkitan nasional masyarakat Indonesia terwujud melalui rasa kebersamaan mereka sebagai sebuah bangsa.

## SIMPULAN

Priayi dengan makna sebagai seseorang yang memiliki kedudukan dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda memiliki kelebihan untuk dapat mengenyam pendidikan lebih layak dibandingkan dengan masyarakat pribumi biasa. Namun sekolah Barat yang diambil oleh para priayi khususnya mereka yang berada di Jawa sebagai pusat peradaban Hindia Belanda seakan belum menjawab permasalahan sosial di lingkungan masyarakat. Adanya istilah pendidikan pagi sebagai bekal masa depan mereka dan pendidikan sore sebagai persiapan kehidupan mencerminkan ketidakharmonisan pengaruh Barat dan lokal pada masa tersebut. Stratifikasi sosial yang ada malah lebih menambah permasalahan pemerataan pendidikan pada masyarakat pribumi. Melihat hal ini priayi dengan pandangan revolusioner hendak melakukan upaya enkulturasi antar golongan yang dalam struktur sosial masyarakat Hindia Belanda. Proses ini didukung dengan kebijakan kolonial di antaranya Politik Etis yang secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi masyarakat pribumi untuk mendapat pendidikan yang lebih layak.

Dekolonialisasi intelektual ditempuh kaum priayi Jawa untuk meredakan ketegangan yang ada antara masyarakat lokal dan kolonial. Gerakan perlawanan imperium Belanda sebagai gabungan dari kesedihan masyarakat, kebesaran kerajaan masa lalu dan janji tokoh intelektual untuk masa depan ditempuh melalui sumber daya manusia yang berpendidikan. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para priayi untuk membangun identitas nasional sebagai bangsa yang satu, sebagai diri sendiri. Transformasi masyarakat melalui bentuk komunitas intelektual priayi banyak memberikan kontribusi nyata pada konsepsi Indonesia sebagai sebuah negara. Golongan berpendidikan yang muncul dari berbagai macam etnisitas dan latar belakang yang berbeda berupaya menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat yang akhirnya bermuara pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Priayi Jawa sebagai representasi historis masyarakat yang terjajah telah tumbuh dengan pendidikan Barat yang melintasi batas kolonialisme dan menuntut diskriminasi kolonial atas rakyat mereka. Kemunculan Indonesia sebagai gabungan dari unsur identitas kolonial hadir melalui penafsiran masa lalu mereka secara mandiri. Dengan pendidikan Barat golongan priayi Jawa berusaha mewujudkan karakter bangsa dengan penekanan pada generasi yang cinta tanah air dan memiliki rasa patriotisme yang tinggi.

Karena temuan ini mengungkapkan bahwa golongan priayi Jawa dengan pendidikan yang dimilikinya mempunyai peranan penting dalam kemajuan masyarakat pada masa Hindia Belanda, tampaknya dapat dipahami bahwa dengan adanya pendidikan dapat menyatukan kelompok masyarakat yang terikat dan memiliki rasa kepunyaan bersama. Pengembangan rasa cinta tanah air bagi masyarakat masa kini dianggap penting guna menghindari pengaruh yang tidak baik dari berbagai macam ancaman disintegrasi bangsa. Sejarah tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai masa lalu, namun memiliki tujuan guna memahami struktur, gagasan, kehendak, dan cita-cita bersama. Ketersediaan sumber sejarah mengenai bentuk dari upaya enkulturasi golongan priayi sebaiknya dapat menjadi saran penelitian ke depannya. Upaya ini tidak lain guna memaknai perjuangan para tokoh perjuangan sekaligus gambaran keberhasilan yang dapat kemudian disesuaikan dan menjadi inspirasi dari kehidupan kita saat ini.

## REFERENSI

- Adam, A. (2020). Priayi dan Pendidikan Menjelang 1900. *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies*, 9.
- Aji, R. N. B., Sumarno, & Hermawan, E. S. (2020). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1945 Dalam Perspektif Penguatan Nasion dan Nasionalisme*. Unesa University Press.
- Alinur. (2017). *Politik Etis Pada Masa Kolonialisme Belanda di Indonesia*. 1–6.  
<https://doi.org/10.31227/osf.io/gjhzk>
- Anderson, B. R. O. (1972). The Idea of Power in Javanese Culture. In Claire Holt (Ed.), *Culture and Politics in Indonesia* (pp. 1–69). Cornell University Press.
- Arimi, R. S. (2008). *PERGESERAN KEKUASAAN BANGSAWAN JAWA*. 10(2), 1–22.
- Astania, R., & Nurani, F. (2019). *Nasionalisme Sebagai Antitesis Neokolonialisme*. 1–5.
- Heru, F. S. S., Sumardi, & Umamah, N. (2014). *SISTEM PENDIDIKAN KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA TAHUN 1900 – 1942*.
- Ismaun, Winarti, M., & Darmawan, W. (2016). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah (APPS).
- Karsiwan, K., & Sari, L. R. (2021). Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda pada Masa Politik Etis di Lampung. *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam*, 6(1), 1–16.  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/twt/article/view/4375>
- Kusumawardani, A., & Faturachman. (2004). Nasionalisme. *Buletin Psikologi*, 12(2), 38–48.  
<https://journal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7469>
- Lombard, D. (2005). *Nusa Jawa : Silang Budaya Batas Batas Pembaratan Batas-Batas Pembaratan* (p. 253).
- Marisa, M., & Hudaidah. (2021). Pendidikan Pada Masa Tanam Paksa dan Politik Liberal Belanda di Indonesia. *Jurnal Humanitas*, 7(Juni), 81–92.
- Nasution, S. (2011). Strategi Pendidikan Belanda Pada Masa Kolonial di Indonesia. *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 2(2), 254–258.  
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/431/333>
- Onghokham. (2004). *Dari Soal Priayi sampai Nyi Blorong: Refleksi Historis Nusantara* (3rd ed.). Penerbit Buku Kompas.
- Poesponegoro, M. D., & Nugroho. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia V*. Balai Pustaka.
- Prasisko, Y. G. (2019). *Demokrasi Indonesia dalam Masyarakat Multikultural*. 1–12.
- Purwanto, B. (2019). *Bambang Purwanto Perspektif Historis Kesadaran Kebangsaan dan Kemerdekaan Indonesia Berdimensi Kebudayaan*. II(2), 125–134.
- Riska, R., & Hudaidah, H. (2021). Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Portugis dan Belanda. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 824–829.  
<http://dx.doi.org/10.31004/edukatif.v3i3.470%0Ahttps://edukatif.org/index.php/edukatif/article/viewFile/470/pdf>
- Rusdiana, Y. T. (2017). Peranan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dalam Upaya Mencapai Kemerdekaan Republik Indonesia. *Jurnal Sriwijaya Historia*, 1(May), 42–55.
- Saddam, Mubin, I., & S.W., D. E. M. (2020). *PERBANDINGAN SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA MULTIKULTURAL*. 5(2), 136–145.
- Salindri, D. (2010). Politik Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda di Hindia Belanda Tahun 1848-1901. *Historia*, V(1), 25–36.
- Sanjaya, A. (2001). *PENDIDIKAN MODERN PRIBUMI MASA PERGERAKAN NASIONAL*.  
<http://lppm.univetbantara.ac.id/data/materi/ageng2.pdf>
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Penerbit Ombak.
- Subekti, A. (2021). Tinjauan Konseptual Perempuan dan Modernitas Dalam Ruang Kolonialisme. *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 15(1), 183.  
<https://doi.org/10.17977/umo20v15i12021p183-194>
- Supardan, D. (2008). Menyingkap Perkembangan Pendidikan Sejak Masa Kolonial Hingga Sekarang : Perspektif Pendidikan Kritis. *Generasi Kampus*, 1(September), 97–99.
- Susilo, A. & Isbandiyah. (2018). POLITIK ETIS DAN PENGARUHNYA BAGI LAHIRNYA PERGERAKAN BANGSA INDONESIA. *Historia*, 6(2), 403–416.
- Sutherland, H. (1975). The Priayi. *Indonesia*, 19, 57–77.
- Suyatno. (2021). Unsur Nilai Nasionalisme Indonesia Sebagai Jiwa Pemersatu Bangsa. *Jurnal Pendidikan*

- Politik, Hukum, Dan Kewarganegaraan*, 11(1), 10–24.
- Utama, W. S. (2018). *Mempropagandakan Kemerdekaan di Eropa : Perhimpunan Indonesia dan Internasionalisasi Gerakan Antikolonial di Paris*. 1(2), 25–45.
- Wahyuni, F. (2015). KURIKULUM DARI MASA KE MASA (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia). *Al-Adabiya*, 10(8), 4.  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/alabadiyah/article/view/2792>
- Wahyuningtyas, B. P. (2017). Selera Budaya Priayi Jawa dalam Konteks Komunikasi Budaya Tradisional. *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, 01(01), 657–667.  
<http://pknk.org/index.php/PKNK/article/view/47/52>
- Widodo, Y. (2017). Media Diaspora Pelajar Indonesia: Eksistensi, Peran, dan Spirit Keindonesiaan. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 14(1), 93. <https://doi.org/10.24002/jik.v14i1.974>
- Yuniarti, E. S. (2018). Pendidikan Bagi Perempuan Jawa Pada Abad Ke 19. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 12(1), 30–38. <http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/4117>